

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo.

a. Program dan Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 telah mengalokasikan dana untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar **Rp241.047.154.863,00**. Anggaran tersebut terbagi pada belanja langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp124.923.145.643,00 dan belanja tidak langsung sejumlah Rp10.227.023.120,00; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp300.000.000,00; Kecamatan Wonosobo sejumlah Rp21.862.000.000,00; Kecamatan Kertek sebesar Rp8.094.000.000,00; Kecamatan Selomerto sejumlah Rp5.104.000.000,00; Kecamatan Leksono sebesar Rp5.816.250.000,00; Kecamatan Watumalang sejumlah Rp5.560.000.000,00; Kecamatan Mojotengah sebesar Rp11.296.235.100,00; Kecamatan Garung sejumlah Rp4.895.000.000,00; Kecamatan Kejajar sebesar Rp2.916.000.000,00; Kecamatan Kalikajar sejumlah Rp8.647.000.000,00; Kecamatan Sapuran sebesar Rp5.525.000.000,00; Kecamatan Kepil sejumlah Rp5.536.501.000,00; Kecamatan Kaliwiro sebesar Rp6.770.000.000,00; Kecamatan Wadaslintang sejumlah 4.825.000.000,00; Kecamatan Sukoharjo sebesar Rp3.918.000.000,00; serta Kecamatan Kalibawang sejumlah Rp4.832.000.000,00.

Prosentase anggaran untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut mencapai 11,63% dari total alokasi APBD Tahun 2018 yang berjumlah Rp2.072.393.505.735,00. Dari alokasi anggaran sebesar Rp241.047.154.863,00 tersebut direalisasikan sebesar **Rp229.796.080.912,00** atau 95,33%. Rincian program dan alokasi anggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.B.3.1

Alokasi Program Anggaran Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
A	Belanja Langsung	241.047.154.863	229.796.080.912	95,33
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.839.872.643	1.694.223.502	92,08
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.568.642.500	1.371.146.219	87,41
3	Program pembangunan jalan dan jembatan	153.188.634.600	148.697.529.133	97,07
4	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	4.863.500.000	4.796.343.150	98,62
5	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	4.200.000.000	3.209.879.923	76,43
6	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	300.000.000	152.057.265	50,69

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
7	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	2.750.000.000	1.629.214.390	59,24
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	20.124.981.000	19.574.329.340	97,26
9	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	50.000.000	46.213.000	92,43
10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	15.982.000.000	14.821.235.100	92,74
11	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	8.251.000.000	8.171.485.000	99,04
12	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	4.450.000.000	4.005.252.013	90,01
13	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	11.541.501.000	11.199.150.000	97,03
14	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur	810.000.000	749.842.727	92,57
15	Program Perencanaan Tata Ruang	200.000.000	146.388.250	73,19
16	Program Pemanfaatan Ruang	150.000.000	140.632.000	93,73
17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	550.000.000	311.863.050	56,70
B	Belanja Tidak langsung	10.227.023.120	9.079.296.850	88,78
1	Belanja Tidak Langsung	10.227.023.120	9.079.296.850	88,78
	Jumlah Total	241.047.154.863	229.796.080.912	95,33

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2018 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung operasional pelaksanaan kegiatan. Program tersebut merupakan belanja wajib dalam mendukung pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada tahun 2018, alokasi anggaran untuk program pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp1.839.872.643,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp1.694.223.502,00 atau sebesar 92,08%. Anggaran tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pokok yang meliputi kegiatan surat menyurat; penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik; jasa administrasi keuangan; penyediaan alat tulis perkantoran; penyediaan barang cetakan dan

penggandaan; penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; penyediaan makanan dan minuman kedinasan, biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor; dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan.

2) Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui penyediaan dan pemenuhan sarana kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur. Pelaksanaan program ini pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan kenyamanan kerja yang menjadi salah satu faktor penunjang peningkatan kinerja aparatur dengan sasaran capaiannya adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana kerja yang memadai akan meningkatkan kualitas pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Jumlah anggaran yang disediakan untuk program peningkatan sarana prasarana aparatur tahun 2018 sebesar Rp1.568.642.5000,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp1.371.146.219,00 atau 87,41%. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu pengadaan sarana dan prasarana kantor; pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor; pemeliharaan rutin/berkala alat berat, perbengkelan, dan prasarana umum; serta rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

3) Program Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jalan dan jembatan merupakan sarana penting sebagai akses penghubung antar wilayah. Kondisi alam Wonosobo dengan tipikal topografi pegunungan dan berbukit-bukit serta beberapa wilayah memiliki struktur tanah yang labil memerlukan upaya dan biaya yang lebih besar dalam membangun jalan dan jembatan tersebut.

Selain sebagai akses penghubung antar wilayah, jalan dan jembatan juga menjadi sarana pokok dalam mobilitas penduduk, barang, maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat. Perputaran distribusi barang dan jasa kepada masyarakat akan menjadi lancar dengan dukungan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai. Disinilah peran penting pembangunan jalan dan jembatan dalam mendukung perputaran perekonomian masyarakat.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran untuk Program pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp153.188.634.6000,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp148.697.529.133,00 atau 97,07%. Program pembangunan jalan dan jembatan tersebut yang utama dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi kegiatan perencanaan pembangunan jalan; peningkatan jalan (DAK); penataan pedestrian jalan; peningkatan jalan (Bantuan Provinsi); peningkatan jalan dan jembatan; peningkatan jalan; pembangunan jembatan (DBHCHT); pembangunan senderan jalan, yang kesemuanya dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp79.459.799.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp76.316.231.233,00 atau 96,04%.

Sedangkan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Wonosobo meliputi kegiatan pembangunan jalan dan pembangunan jembatan dengan anggaran sebesar Rp14.255.000.000,00 yang terealisasi sejumlah Rp13.853.652.000,00 atau 97,18%. Kecamatan Kertek melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dan pembangunan jembatan dengan anggaran sebesar Rp4.908.000.000,00 dan terealisasi sejumlah Rp4.681.928.500,00 atau 95,39%. Kemudian Kecamatan Selomerto melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dan pembangunan jembatan dengan anggaran sebesar Rp3.434.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.411.391.000,00 atau 99,37%. Untuk Kecamatan Leksono melaksanakan kegiatan pembangunan jalan sebesar Rp4.466.250.000,00 dan terealisasi sejumlah Rp4.447.795.000,00 atau 99,59%. Kecamatan Watumalang melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dengan anggaran sebesar Rp4.472.350.000,00 dan direalisasikan sejumlah Rp4.430.479.000,00 atau 99,06%. Selanjutnya Kecamatan Mojotengah melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dan pembangunan jembatan dengan anggaran Rp7.076.235.100,00 dan realisasi sebesar Rp7.017.106.000,00 atau 99,12%. Untuk Kecamatan Garung melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dengan anggaran sebesar Rp3.805.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.772.902.000,00 atau 97,51%. Berikutnya Kecamatan Kejajar melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.331.000.000,00 dan terealisasi sejumlah Rp1.318.874.000,00 atau 99,09%. Sedangkan Kecamatan Kalikajar melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dan pembangunan jembatan alokasi anggaran Rp5.562.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.513.25.900,00 atau 99,12%. Kemudian Kecamatan Sapuran melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dan pembangunan jembatan dengan anggaran sebesar Rp4.150.000.000,00 dan terealisasi sejumlah Rp4.111.295.000,00 atau 99,07%. Kecamatan Kepil melaksanakan kegiatan pembangunan jalan sebesar Rp4.500.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp4.437.846.000,00 atau 98,62%. Untuk Kecamatan Kaliwiro melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dengan anggaran Rp4.990.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.965.899.000,00 atau 99,52%. Selanjutnya Kecamatan Wadaslintang melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dengan anggaran sebesar Rp4.825.000.000,00 dan terealisasi sejumlah Rp4.454.156.000,00 atau 99,31%. Kemudian Kecamatan Sukoharjo melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dan pembangunan jembatan dengan anggaran sebesar Rp3.041.000.000,00 dan realisasinya sebanyak Rp3.019.969.500,00 atau 99,31%. Dan Kecamatan Kalibawang yang melaksanakan kegiatan pembangunan jalan sebesar Rp3.253.000.000,00 dan terealisasi sebanyak Rp4.586.629.000,00 atau 93,14%.

Kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan jalan maupun jembatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, serta penyusunan perencanaan untuk memenuhi *readyness criteria* bagi usulan kegiatan tahun berikutnya. Penyusunan perencanaan untuk tahun berikutnya terutama ditujukan bagi kegiatan yang sumber pendanaannya diusulkan dari provinsi maupun dari pusat. Penyusunan perencanaan juga memperhatikan prioritas dan rencana tahapan dalam penyelesaian permasalahan serta pengembangan jaringan jalan. Dengan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jalan maupun jembatan diharapkan lebih banyak peluang untuk memperoleh sumber pendanaan pembangunan di luar APBD Kabupaten Wonosobo

sehingga penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan maupun jembatan bisa dilakukan percepatan.

Kegiatan peningkatan jalan yang bersumber dari DAK tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp18.973.000.000,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp16.587.796.340,00 atau 87,43%. Jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk peningkatan ruas jalan Rake Panangkaran (PLN-Dieng Wetan). Kegiatan ini merupakan upaya lanjutan pembukaan jalur baru akses menuju Dieng. Jalur tersebut akan dijadikan sebagai jalur alternatif menuju Kawasan Wisata Dieng karena jalur utama yang ada sekarang merupakan jalur rawan bencana. Peningkatan jalur baru tersebut juga sebagai langkah untuk mengurangi kepadatan jalur menuju Dieng terutama pada saat musim libur maupun hari raya dimana jumlah pengunjung Dieng meningkat secara signifikan. Di samping itu, jalur PLN-Dieng Wetan dapat menjadi jalur penghubung antar objek yang ada di Kabupaten Wonosobo terutama objek wisata Dieng dengan objek yang ada di bawahnya seperti Telaga Menjer, Kalianget, maupun objek lainnya.

Kegiatan peningkatan jalan yang bersumber dari dana Bantuan Provinsi sebesar Rp37.203.916.500,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp36.753.726.893,00 atau 98,79%. Alokasi dana bantuan provinsi tersebut digunakan untuk 16 kegiatan peningkatan jalan serta 2 kegiatan pembangunan jembatan yaitu Peningkatan Jalan Rake Panangkaran; Peningkatan Jalan Kembaran-Banyumudal; Peningkatan Jalan Mojosari-Lumajang; Peningkatan Jalan Sempol-Wonosroyo; Peningkatan Jalan Gintung-Mentasari Kaliwiro; Peningkatan Jalan Rake Watumalang; Peningkatan Jalan Ruas Dempel-Mergolangu; Peningkatan Jalan dan Senderan Ruas Slukatan-Kalibeber; Peningkatan Jalan dan Sederan Ruas Kalibeber-Munggang; Peningkatan Jalan dan Senderan Ruas Candirejo-Sojopuro; Peningkatan Jalan dan Senderan Ruas Jogoyitnan-Karangtengah; Peningkatan Jalan Kyai Abdul Faqih (Kejiwan-Sukorejo); Perbaikan Jalan Mboto-Pacarmulyo Leksono; Peningkatan Ruas Jalan Binangun-Wonosroyo Watumalang; Peningkatan Ruas Jalan Keseneng-Candiyasan; Peningkatan Ruas Jalan Depok-Mergolangu Kalibawang; Penggantian Jembatan Siwuni Ruas Sayangan Plobangan; dan Pembangunan Jembatan Kalicecep Desa Bejiarum Kertek.

4) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong merupakan kegiatan pembangunan sebagai pelengkap maupun pendukung bagi fungsi jalan. Selain itu, secara teknis drainase mempunyai fungsi untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal, sebagai pengendali air kepermukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air/banjir, menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal, mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada, dan mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir. Pada program ini, untuk tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran sebesar Rp4.863.500.000,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp4.796.343.150,00 atau 98,62%.

Kegiatan pada program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dan pemeliharaan rutin saluran drainase perkotaan, dengan anggaran sebesar Rp1.050.000.000,00 dan realisasi sejumlah Rp1.023.837.150,00 atau 97,51%. Sedangkan Kecamatan-Kecamatan melaksanakan kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dengan rincian : Kecamatan Wonosobo dengan rencana anggaran Rp1.360.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.351.826.000,00 atau 99,40%; Kecamatan Kertek dengan rencana anggaran Rp485.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp472.091.500,00 atau 97,34%; Kecamatan Selomerto dengan rencana anggaran Rp290.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp287.976.000,00 atau 99,34%; Kecamatan Mojotengah dengan rencana anggaran Rp365.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp359.290.000,00 atau 98,44%; Kecamatan Kalikajar dengan rencana anggaran Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp147.662.000,00 atau 98,44%; Kecamatan Sapuran dengan rencana anggaran Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp99.335.000,00 atau 99,34%; Kecamatan Kaliwiro dengan rencana anggaran Rp700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp596.899.000,00 atau 99,46%; dan Kecamatan Sukoharjo dengan rencana anggaran Rp363.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp358.102.500,00 atau 98,52%;

5) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Penyelenggaraan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk di dalamnya kewajiban untuk mengatur, membina, membangun, mengawasi dan merehabilitasi jalan dan jembatan. Dalam upaya untuk menjaga kelangsungan fungsi jalan dan jembatan, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan tujuan mempertahankan kondisi pelayanan infrastruktur jalan/jembatan untuk tetap pada kondisi baik sehingga umur ekonomis jalan dan jembatan yang telah terbangun dapat dicapai secara maksimal.

Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk mengembalikan fungsi infrastruktur dan dilakukan pada obyek yang mengalami penurunan fungsi dan tingkat kapasitas pelayanan sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan infrastruktur tersebut. Hal ini dilakukan dengan perbaikan struktural jalan maupun jembatan sehingga fungsi pelayanan dari jalan dan jembatan tersebut dapat kembali normal. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pemeliharaan baik berupa pemeliharaan rutin maupun kegiatan pemeliharaan berkala terhadap infrastruktur jalan dan jembatan yang ada.

Dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, pada tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp4.200.000.000,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp3.209.879.923,00 atau 76,43%. Alokasi dana tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan; rehabilitasi/pemeliharaan jembatan; dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan (UPTD). Perencanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan baik berupa penanganan pemeliharaan rutin jalan maupun pemeliharaan berkala diupayakan untuk terus ditingkatkan seiring dengan target peningkatan capaian pembangunan jalan yang harus dicapai. Kegiatan pemeliharaan ini ditujukan

pada ruas jalan kondisi mantap untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada infrastruktur jalan dan jembatan yang dapat berakibat pada tingginya biaya penanganan.

6) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Program inspeksi kondisi jalan merupakan salah satu upaya pengayaan data terhadap kondisi jalan dengan melakukan survey dan memetakan kondisi jalan di Kabupaten Wonosobo. Upaya ini ditempuh dalam rangka menilai/mengukur kebutuhan biaya yang diperlukan untuk pembangunan jalan. Selain itu, inspeksi kondisi jalan juga diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan menentukan prioritas lokasi pembangunan.

Pada tahun 2018, untuk program inspeksi jalan dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp152.057.265,00 atau 50,69%. Anggaran tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kegiatan inspeksi kondisi jalan; inspeksi kondisi jembatan; dan pembuatan leger jalan. Namun demikian dari anggaran yang tersedia belum bisa memetakan kondisi jalan Kabupaten Wonosobo secara menyeluruh sehingga hasil yang diharapkan belum tercapai secara maksimal. Pada tahun mendatang, diharapkan kegiatan pemetaan kondisi jalan ini dapat dilanjutkan mengingat ketersediaan peta kondisi jalan akan dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas pembangunan jalan maupun penyusunan perencanaan.

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan urusan pekerjaan umum bidang bina marga. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan pengadaan alat-alat berat; pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan; pengadaan sarana prasarana kebinamargaan; serta pengadaan mini walker. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.750.000.000,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp1.629.214.390,00 atau 59,24%.

8) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Sebagai daerah dengan sebagian besar kondisi geografis pegunungan, wilayah Kabupaten Wonosobo secara langsung dibebani oleh fungsinya sebagai daerah tangkapan dan sumber air bagi wilayah di sekitarnya. Bagi daerah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pengembangan sektor sumber daya air menjadi salah satu kunci penting pengembangan sektor pertanian. Oleh karena itu, merupakan upaya yang tepat bila kebijakan pembangunan sumber daya air diarahkan untuk menunjang sektor pertanian menuju peningkatan ketahanan pangan, dalam hal ini kebijakan teknis operasional yang dirasakan sesuai adalah rehabilitasi dan peningkatan kapasitas jaringan irigasi.

Rehabilitasi dan peningkatan kapasitas jaringan irigasi mempunyai nilai yang strategis karena secara langsung akan menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya produksi pertanian dan perputaran roda perekonomian di Kabupaten Wonosobo. Dengan kata lain, dengan potensi air irigasi yang dimanfaatkan secara optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Rehabilitasi dan peningkatan kapasitas jaringan irigasi dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur penunjang pertanian. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya ini merupakan suatu prioritas utama pemerintah Wonosobo dalam upaya penanganan sarana irigasi yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan air pertanian melalui efektifitas distribusi air pertanian dengan ketersediaan infrastruktur yang baik.

Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan dana untuk program ini sebesar Rp20.124.981.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp19.574.329.340,00 atau 97,26%. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya utamanya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi kegiatan perencanaan pembangunan jaringan irigasi; pembangunan/ rehabilitasi jaringan irigasi; pemeliharaan rutin jaringan irigasi; rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi (DAK); dan pemeliharaan rutin jaringan irigasi (UPTD), kesemuanya dialokasikan anggaran sebesar Rp12.212.831.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp11.725.779.340,00 atau 96,01%. Selain itu Kecamatan-Kecamatan juga melaksanakan program ini melalui kegiatan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dengan rincian : Kecamatan Wonosobo dengan rencana anggaran Rp1.240.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.233.341.000,00 atau 99,46%; Kecamatan Kertek dengan rencana anggaran Rp1.106.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.094.104.000,00 atau 98,92%; Kecamatan Selomerto dengan rencana anggaran Rp585.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp581.689.000,00 atau 99,43%; Kecamatan Leksono dengan rencana anggaran Rp1.150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.139.555.000,00 atau 99,09%; Kecamatan Watumalang dengan rencana anggaran Rp317.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp316.190.000,00 atau 99,54%; Kecamatan Mojotengah dengan rencana anggaran Rp685.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp676.401.000,00 atau 98,74%; Kecamatan Kalikajar dengan rencana anggaran Rp1.385.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.373.767.000,00 atau 99,19%; Kecamatan Sapuran dengan rencana anggaran Rp175.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp174.101.000,00 atau 99,49%; Kecamatan Kaliwiro dengan rencana anggaran Rp655.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp651.459.000,00 atau 99,46%; Kecamatan Wadaslintang dengan rencana anggaran Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp96.993.000,00 atau 97,95%; serta Kecamatan Sukoharjo dengan rencana anggaran Rp513.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp510.950.000,00 atau 99,50%.

9) Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya

Pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran untuk Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp46.213.000,00 atau 92,43%. Anggaran program tersebut dilaksanakan oleh Kecamatan Kepil untuk kegiatan Pelatihan pengelolaan DAS bagi desa terdampak bencana.

10) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah ditujukan dalam rangka memenuhi lingkungan bersih dan sehat, dimana air bersih dan lingkungan yang sehat merupakan kebutuhan pokok manusia. Program tersebut juga merupakan salah satu upaya dalam mendukung capaian program pemerintah pusat 100-0-100. Maksudnya adalah 100 yang pertama itu, bagaimana akses air minum terpenuhi untuk masyarakat tercapai 100%, 0 yang ke dua adalah bagaimana kawasan kumuh itu bisa hilang hingga target 0 persen, serta 100 yang ke tiga adalah bagaimana sanitasi lingkungan terpenuhi dengan baik. Target pembangunan pemerintah pusat sampai dengan 2019 adalah pelayanan akses universal air minum dan sanitasi kepada seluruh masyarakat serta terwujudnya kota tanpa kawasan kumuh, pada kawasan kumuh akan dibangun prasarana dan sarana dasar air minum dan sanitasi untuk menambah akses air minum menjadi 100 persen dan akses sanitasi layak 100 persen, sehingga mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen pada 2019.

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp15.982.000.000,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp14.821.235.100,00 atau 92,74%. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah utamanya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah; penunjang kegiatan PAMSIMAS; fasilitasi pembinaan BPSPAMS; fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah (pajak rokok); pembangunan IPAL; Pengadaan Sarana Air Minum; Pembuatan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler); Pembuatan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan); Peningkatan Akses Air Limbah Setempat Kabupaten Wonosobo; Pembangunan SPAM (DAK Reguler); dan Pembangunan SPAM (DAK Penugasan). Dari semua kegiatan tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp15.682.000.000,00 dengan realisasi sebanyak Rp14.522.980.100,00 atau 92,61%. Disamping itu Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah juga dilaksanakan oleh Kecamatan Kejajar untuk kegiatan pembangunan IPAL dan Pendampingan PAMSIMAS Kelurahan Kejajar dengan anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan terealisasi sejumlah Rp298.255.000,00 atau 99,42%.

11) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan air bersih, melalui program penyediaan dan pengelolaan air baku dialokasikan untuk kegiatan pembangunan sarana penyediaan air minum dan pembangunan sistem air minum perdesaan Kegiatan pembangunan sarana penyediaan air minum ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih terutama diluar area yang menjadi layanan PDAM, Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran untuk program penyediaan dan pengelolaan air baku tersebut sebesar Rp8.251.000.000,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp8.171.485.000,00 atau 99,04%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa oleh Kecamatan Wonosobo dengan rencana anggaran Rp1.142.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.135.700.000,00 atau 99,45%; Kecamatan Kertek dengan rencana anggaran Rp585.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp576.501.000,00 atau 98,55%; Kecamatan Watumalang dengan rencana anggaran Rp170.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp169.012.000,00 atau 99,42%; Kecamatan Mojotengah dengan rencana anggaran Rp1.565.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.554.196.000,00 atau 99,31%; Kecamatan Garung dengan rencana anggaran Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp149.670.000,00 atau 99,78%; Kecamatan Kejajar dengan rencana anggaran Rp300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp295.098.000,00 atau 98,37%; Kecamatan Sapuran dengan rencana anggaran Rp650.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp641.985.000,00 atau 98,77%; Kecamatan Kepil dengan rencana anggaran Rp560.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp551.555.000,00 atau 98,49%; dan Kecamatan Kalibawang dengan rencana anggaran Rp1.579.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.556.649.000,00 atau 98,58%.

12) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kawasan strategis cepat tumbuh merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis, dimana kawasan tersebut juga dapat menggerakkan pertumbuhan wilayah ekonomi yang berada di sekitarnya. Kawasan strategis cepat tumbuh bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan; meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan; mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antar wilayah secara fungsional, dan antar daerah yang relatif sudah berkembang dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi; mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; serta menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan, dan keserasian pertumbuhan wilayah.

Pada tahun 2018 untuk program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.450.000.000,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp4.005.252.013,00 atau 90,01%. Alokasi tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur; perencanaan T-1 bidang keciptakaryaan; dan peningkatan RTP.

13) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Kabupaten Wonosobo memiliki wilayah pedesaan yang mencapai lebih dari 70%. Salah satu isu yang terkait dengan perdesaan antara lain kurangnya aksesibilitas di perdesaan, dan kesenjangan perdesaan dengan perkotaan, Pada dasarnya program pembangunan infrastruktur mempunyai tujuan penyediaan infrastruktur dasar pendukung kehidupan

di pedesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, dukungan terhadap kawasan terpencil maupun kawasan yang mempunyai aksesibilitas rendah. Sebagai satu program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat pedesaan, program pembangunan infrastruktur pedesaan diharapkan mampu menjadi faktor pendorong pertumbuhan wilayah pedesaan sekaligus mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan masyarakat pedesaan.

Alokasi anggaran untuk program pembangunan infrastruktur pedesaan tahun 2018 sebesar Rp11.541.501.000,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp11.199.150.000,00 atau 97,03%. Program pembangunan infrastruktur pedesaan ini diimplementasikan dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi gedung/bangunan fasilitas umum lainnya yang dilaksanakan oleh Kecamatan Wonosobo dengan rencana anggaran Rp3.865.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.742.332.000,00 atau 96,83%; Kecamatan Kertek dengan rencana anggaran Rp1.010.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp851.041.000,00 atau 84,26%; Kecamatan Selomerto dengan rencana anggaran Rp795.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp790.586.000,00 atau 99,44%; Kecamatan Leksono dengan rencana anggaran Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp199.047.000,00 atau 99,52%; Kecamatan Watumalang dengan rencana anggaran Rp600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp596.189.000,00 atau 99,36%; Kecamatan Mojotengah dengan rencana anggaran Rp1.605.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.589.544.000,00 atau 99,31%; Kecamatan Garung dengan rencana anggaran Rp940.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp935.558.000,00 atau 99,53%; Kecamatan Kejajar dengan rencana anggaran Rp985.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp871.238.000,00 atau 98,60%; Kecamatan Sapuran dengan rencana anggaran Rp450.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp446.122.000,00 atau 99,14%; Kecamatan Kepil dengan rencana anggaran Rp426.501.000,00 dan terealisasi sebesar Rp419.901.000,00 atau 98,45%; Kecamatan Kaliwiro dengan rencana anggaran Rp425.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp422.523.000,00 atau 99,42%; dan Kecamatan Wadaslintang dengan rencana anggaran Rp240.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp235.069.000,00 atau 97,95%.

14) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pekerjaan umum kepada masyarakat dan peningkatan kualitas infrastruktur daerah diperlukan kemampuan atau kapasitas kelembagaan pemerintah yang memadai. Pada tahun 2018 dialokasikan anggaran untuk program peningkatan kelembagaan infrastruktur sebesar Rp810.000.000,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp749.842.727,00 atau 92,57%. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan pendamping tenaga teknis AHSP, monev bidang infrastruktur; peningkatan kapasitas perencanaan bangunan dengan standar aksesibilitas bangunan, dan fasilitasi perencanaan dan pelaporan yang kesemuanya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah senantiasa mengandung sebuah pemahaman tentang berbagai upaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi urusan umum sebagai salah satu organisasi sektor publik, maka penting bagi perangkat daerah untuk melaksanakan apa

yang dimaksud dengan *capacity building*. Hal tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk kegiatan fasilitasi forum kemitraan bidang infrastruktur baik pada tingkat regional maupun nasional. Dengan adanya forum kemitraan bidang infrastruktur, maka dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam peningkatan infrastruktur daerah serta sebagai wadah diskusi dalam mencari solusi permasalahan bidang infrastruktur secara umum.

15) Program Perencanaan Tata Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang bertujuan untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan program-program pembangunan dalam jangka panjang panjang serta mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai arahan/fungsi. Dalam jangka pendek, program ini dimaksudkan untuk memberikan arah dalam pemanfaatan ruang, juga merupakan arahan dalam investasi, dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran untuk Program Perencanaan Tata Ruang sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp146.338.250,00 atau 73,19%. Anggaran program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kegiatan fasilitasi kota pusaka.

16) Program Pemanfaatan Ruang

Alokasi anggaran tahun 2018 untuk Program Pemanfaatan Ruang sebesar Rp150.000.000,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp140.632.000,00 atau 93,73%. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan program tersebut untuk kegiatan survey dan pemetaan berupa Pemetaan Tematik skala detail kawasan perkotaan Wonosobo.

17) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 mengalokasikan anggaran untuk Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebesar Rp550.000.000,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp311.863.050,00 atau 56,70%. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kegiatan peningkatan pelayanan perijinan (IMB); dan Optimalisasi layanan informasi dan Konsultasi Penataan Ruang. Sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan kegiatan Pemetaan bangunan yang berijin; serta Peningkatan penerbitan perijinan (IMB);

Secara tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) di tingkat kabupaten, terdapat dua instansi pemerintah daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta satu instansi vertikal (Kantor ATR/BPN) yang berwenang menangani urusan penataan ruang di daerah. Sebagai upaya dalam rangka mengefektifkan tugas dari masing-masing perangkat daerah, maka perlu dibentuk lembaga adhoc yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Wonosobo. Keberadaan Badan ini ditujukan untuk menjembatani

masing-masing kewenangan yang dimiliki oleh 3 institusi tersebut sekaligus sebagai langkah untuk mewujudkan sinergitas yang kokoh dari masing-masing stakeholder. Fasilitas BKPRD diwujudkan dalam bentuk rapat/sidang tim pokja perencanaan tata ruang dan pokja pengendalian pemanfaatan ruang. Selain untuk kebutuhan rapat/sidang fasilitas juga diberikan untuk membiayai monitoring lapangan atas permohonan rekomendasi tata ruang, dugaan pelanggaran tata ruang maupun koordinasi ke BKPRD Provinsi Jawa Tengah dan juga pemerintah pusat.

c. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian Kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel IV.B.3.2
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan
Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

No	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD) 2021
					Target 2018	Realisasi 2018	% Realisasi Capaian 2018	Status Capaian	
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	50,339	58,500	42,04	71,86	● ● ●	65,00
		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang	%	29,17	64,255	24,78	38,56	△ △ △ △	17,00
		Persentase jumlah jembatan kondisi baik	%	74,473	70,415	73,77	104,76	0	85,00
		Persentase KSCT yang terbangun jalan lingkar	%	28%	20%	28%	140,00	0	60,00
2	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat kemantapan jalan		74,441	65	66,82	102,80	0	75,00
		Persentase Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin per tahun	%	8,006	8	5,56	69,50	● ● ●	25,00

IV.B.3. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD) 2021
					Target 2018	Realisasi 2018	% Realisasi Capaian 2018	Status Capaian	
		Persentase jembatan kondisi rusak yang direhabilitasi per tahun	%	9,091	20	15,15	75,75	◇	22,00
3	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Rasio ruas jalan yang telah dilakukan inspeksi/pemeriksaan rutin		1,000	0,675	1	148,15	0	0,75
		Rasio jembatan yang telah dilakukan inspeksi/pemeriksaan rutin		1,000	1	1	100,00	0	1,00
		Persentase panjang jalan yang dileger	%	0	1	0	0	Δ Δ Δ Δ	60,00
4	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Rasio Panjang jalan rusak akibat bencana yang direhabilitasi		1,000	0,9000	0	0	Δ Δ Δ Δ	1,00
		Rasio Jumlah jembatan rusak akibat bencana yang direhabilitasi		0	1	0	0	Δ Δ Δ Δ	1,00
5	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Rasio drainase jalan kondisi baik dan sedang		0,969	0,685	0,969	1,41,46	0	0,80
		Persentase panjang drainase perkotaan kondisi baik	%		68,500	DTT		Δ Δ Δ Δ	80,00
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase jaringan Irigasi Kabupaten kondisi baik	%	66,726	72,535	68,78	94,82	◇	75,00

IV.B.3. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD) 2021
					Target 2018	Realisasi 2018	% Realisasi Capaian 2018	Status Capaian	
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang layak	%	89,333	92,670	92,87	100,22	0	100,00
		Persentase satuan permukiman (RW) yang memiliki IPAL komunal	%	28,082	2,850	3,48	122,11	0	3,75
		Persentase desa yang memiliki BPSPAM	%	73,885	71,000	50,94	71,75	...	56,00
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%		20,73	23,07	111,29	0	40,00
		Persentase penduduk berakses sanitasi	%	52,667	74,200	58,60	78,98	...	100,00
8	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase KK ber akses sanitasi layak	%		44,51	32,05	72,01	...	68,00
		Persentase Kawasan Kumuh perkotaan	%	1,860	0,199	0,5	39,8	Δ Δ Δ Δ	0,00
		Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	12,71	8,50	77,04	906,35	0	10,00
9	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten	%	78,96	84,38	78,96	93,58	◇	100,00

IV.B.3. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD) 2021
					Target 2018	Realisasi 2018	% Realisasi Capaian 2018	Status Capaian	
		beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital							
		Persentase RDTR yang dilegalisasi	%	0	7	0	0	Δ Δ Δ Δ	53,00
10	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase luas permukiman yang tertata	%		82,50	DTT		Δ Δ Δ Δ	90,00
		Persentase peta RDTR yang direkomendasi BIG	%	0	25	0	0	Δ Δ Δ Δ	100,00
12	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio Bangunan/ Rumah yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang		0,00	26	DTT		Δ Δ Δ Δ	20,00
		Persentase jumlah Izin mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	%	0,49	22,5	5,83	25,91	Δ Δ Δ Δ	60,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2018

Keterangan Status Capaian:

0	Telah Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
◇	Akan tercapai	Realisasi capaian $>80\%$ - 99,99%
● ● ●	Perlu Perhatian	Realisasi capaian $>40\%$ dan $<80\%$
Δ Δ Δ Δ	Perlu Kerja Keras	Realisasi capaian $\leq 40\%$

Dari tabel Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja program untuk prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik tercapai sebesar 42,04%. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan target capaian RPJMD tahun 2018 sebesar 58,50%. Hal ini terkait dengan adanya Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 630/300/2016 tentang penetapan status ruas jalan sebagai jalan Kabupaten Wonosobo dimana panjang jalan kabupaten bertambah sebanyak 219,385 km dari semula 779,891 km menjadi 999,276 km. Pemerintah Kabupaten Wonosobo mencoba untuk mencukupi kebutuhan anggaran melalui Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

serta Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, akan tetapi anggaran untuk pembangunan/rehabilitasi jalan tersebut belum sebanding dengan laju kerusakan jalan baik yang disebabkan karena faktor teknis maupun faktor alam.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih memprioritaskan pembangunan beberapa ruas jalan strategis guna mendukung Dieng sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Diantara ruas jalan yang dilanjutkan pembangunannya pada tahun 2018 adalah Candiyan-Keseneng dan ruas Jalan Rake Panangkaran. Ruas jalan Candiyan-Keseneng ditujukan untuk mengantisipasi titik rawan kecelakaan dari arah Kledung sampai Kertek, mengurangi tingkat kepadatan di pertigaan Kertek, sebagai pendukung pariwisata, serta membuka akses pengembangan wilayah baru pada koridor Kertek bagian utara sampai dengan pertigaan Andongsili. Namun demikian mengingat keterbatasan anggaran pembangunan jalan Candiyan-Keseneng ini belum dapat dituntaskan sepanjang ruas sehingga fungsinya belum optimal.

Disamping itu juga dilakukan pembangunan jalan strategis lainnya yaitu ruas Jalan Rake Panangkaran yang menghubungkan Menjer dengan Dieng (PLN-Dieng Wetan). Ruas ini akan dijadikan jalur alternatif menuju kawasan Dieng dimana jalur utama yang ada sekarang sebagian besar merupakan daerah rawan bencana alam terutama tanah longsor, yang mengakibatkan akses ke Dieng dapat terisolir secara total. Keberadaan Jalan Rake Panangkaran juga diharapkan mampu menjadi pengurai kepadatan lalu lintas di Kawasan Wisata Dieng yang terjadi pada musim libur atau pada hari-hari raya dimana jumlah pengunjung meningkat secara drastis.

Selain menjadi pendukung KSPN Dieng, pembangunan ruas Jalan Rake Panangkaran diharapkan dapat menjadi jalur integrasi antar objek wisata yang ada di Kabupaten Wonosobo antara Dataran Tinggi Dieng dengan Telaga Menjer maupun objek lainnya yang berada di kawasan Perkotaan Wonosobo. Selama ini, dalam kepariwisataan lebih dikenal kawasan Dieng daripada Wonosobo itu sendiri sehingga dengan adanya jalur integrasi antar objek diharapkan dapat mengenalkan pariwisata Wonosobo secara keseluruhan. Di sisi lain, pembangunan Jalan Rake Panangkaran juga merupakan langkah antisipatif Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat dengan adanya pembangunan jalan Tol Trans Jawa melalui jalur Pantura. Dengan adanya pembangunan Jalan Tol tersebut, berkembang wacana pembangunan jalur akses menuju Dieng dari Kabupaten Batang. Jika hal ini terjadi maka besar kemungkinan pengunjung Dieng tidak lagi lewat jalur perkotaan Wonosobo sehingga keberadaan Jalan Rake Panangkaran mempunyai peran strategis sebagai jalur integrasi antar objek yang diharapkan akan dapat menarik pengunjung untuk mengakses objek yang berada di bawah Kawasan Dieng.

Sedangkan indikator kinerja program untuk prosentase daerah irigasi dalam kondisi baik mencapai 68,78% dari target sebesar 72,535% atau terjadi selisih sebesar 3,755%. Hal tersebut salah satunya disebabkan kondisi geografis dan topografis Kabupaten Wonosobo yang sebagian besar mempunyai tekanan air yang besar sehingga menggerus bangunan serta mengurangi umur teknis bangunan air dan jaringan irigasi.

Pada program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, indikasi kinerja program untuk persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang layak telah mencapai 92,87% dari yang ditargetkan sebesar 92,67% atau realisasinya sebesar

100,22%. Merupakan kolaborasi dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pengadaan sarana air minum, Pembangunan SPAM (DAK Reguler dan DAK Penugasan), dan Kecamatan-Kecamatan yang melaksanakan program sejenis serta PDAM Tirta Aji Wonosobo dengan program reguler dan Hibah Air Minum Perkotaan untuk MBR. Capaian ini diharapkan dapat didorong terus untuk memenuhi target *universal acces* khususnya di sektor air minum agar dapat mencapai akses 100% di tahun 2019 mendatang.

Dalam kaitannya dengan indikator kinerja program untuk persentase RDTR yang dilegalisasi serta direkomendasi BIG, masih belum ada peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu capaian masih 0%. Dari keseluruhan RDTR yang diamanatkan oleh Perda RTRW Kabupaten Wonosobo, baru tersusun 13 naskah studi RDTR Kecamatan, yang mana hasilnya belum memenuhi persyaratan teknis yang dibutuhkan. Secara umum penyusunan RDTR di Provinsi Jawa Tengah masih menemui kendala, hingga tahun 2018 belum ada satupun Kabupaten/Kota yang berhasil menetapkan perda RDTR.

d. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, beberapa permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan yaitu :

Tabel IV.B.3.4
Matriks Permasalahan dan Solusi
pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Permasalahan	Solusi
1	Belum tersedianya data infrastruktur yang lengkap dan terintegrasi dengan sistem	Perlunya memperkuat basis data infrastruktur dengan melibatkan unsur teknologi informasi didalamnya. Dengan basis data yang kuat maka akan diperoleh informasi awal yang akurat, sehingga penanganan yang dilakukan akan bisa lebih efektif dan efisien
2	Kondisi geografis yang berupa pegunungan banyak jalan yang menyusuri lereng, beberapa wilayah memiliki struktur tanah yang labil	Penyusunan perencanaan konstruksi infrastruktur sesuai dengan kondisi geografis lokasi pembangunan
3	Tingginya curah hujan dan beban muatan kendaraan besar angkutan barang yang melebihi kemampuan beban jalan menyebabkan umur teknis jalan cepat rusak	Mengupayakan pembangunan jalan yang dibarengi dengan kelengkapan pendukungnya seperti drainase sehingga ruang aliran air tidak menggerus badan jalan

No	Permasalahan	Solusi
4	Pesatnya laju pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan luas maupun ruas jalan	Mengupayakan pembukaan ruas jalan baru yang diharapkan akan mengurangi kepadatan jalan dan memperancar arus pergerakan maupun distribusi barang, serta membuka daerah pertumbuhan baru
5	Penyebaran alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang masih belum merata pada semua wilayah menyebabkan ketimpangan perkembangan antar wilayah	Mendorong alokasi anggaran dengan memperhatikan faktor kewilayahan sehingga pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu, akan tetapi tersebar ke semua wilayah yang akan menciptakan pemerataan
6	Alokasi anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan ruas jalan yang menyebabkan perbaikan infrastruktur jalan belum bisa tuntas untuk satu ruas jalan	Perlu didorong penetapan pagu kegiatan infrastruktur dengan pendekatan tuntas ruas sehingga akan memberikan manfaat ruas jalan yang lebih besar bagi masyarakat
7	Meningkatnya kebutuhan permukiman yang masih sulit untuk dikendalikan mengakibatkan ancaman eksistensi daerah irigasi yang dihadapkan dengan laju alih fungsi lahan pertanian	Permasalahan infrastruktur terkait perkembangan kewilayahan dapat diminimalisir melalui pengendalian pemanfaatan ruang dengan kebijakan yang lebih terarah termasuk pelaksanaan insentif dan disinsentif
8	Belum optimalnya kualitas hasil rencana tata ruang, kompetensi dan kapasitas penyusun dokumen tata ruang yang belum memadai terutama dalam aspek spasial/keruangan	Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan, pengolahan dan pengelolaan peta dasar yang berkualitas dan citra satelit resolusi tinggi serta mengupayakan peningkatan kapasitas SDM daerah dibidang penataan ruang melalui diklat dan bimtek penataan ruang tingkat daerah maupun pusat
9	Munculnya konflik sektoral dalam memanfaatkan ruang seperti: kehutanan, pertambangan, perindustrian, pertanian, lingkungan hidup, pariwisata dan sebagainya	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang antarsektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan melalui optimalisasi peran BKPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah